

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, Kumadji, dan Husaini. (2015). *“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. (2019). Jumlah dan Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2017. [online] diambil dari : <https://sumbar.bps.go.id/> pada tanggal 9 Maret 2019.
- Direktorat Jendral Pajak. (2017). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak. [online]. <http://pajak.go.id>. diakses pada tanggal 11 Maret 2019.
- Hanifah, Siti Farah. (2018). *“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi pada UMKM Wilayah Kota Padang)”*. Universitas Andalas. Padang.
- Hendri, Nedi. (2016). *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM di Kota Metro”*. Universitas Muhammadiyah Metro. Metro.
- Ilyas, Wirawan, dan B. Richard Burton. (2010). *Hukum Pajak*. Edisi V. Jakarta : Salemba Empat.
- Indriantoro, dan Supomo. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manaemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Mardiasmo, Prof. Dr. MBA, Ak. (2016). *Perpajakan*. ANDI. Yogyakarta.
- Mulyadi. (2006). *Perpajakan*. Salemba, Edisi 4.
- Mutia, Dona. (2018). *“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi pada UMKM Wilayah Kota Bukittinggi)”*. Universitas Andalas. Padang.
- Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sekaran, Umma. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tatik. (2018). “Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta)”. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- www.republika.co.id, “*Kepatuhan Pengusaha UMKM Membayar Pajak Rendah*”. [online] diakses tanggal 10 Maret 2019.
- [Yusro, Heny Wachdiatul dan Kiswanto. \(2014\). “Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara”. Universitas Negeri Semarang. Semarang.](#)
- Zawitri, Sari dan Yuliana, Elsa Sari. (2016). “*Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1% (Final) PPh (Studi Kasus di KPP Pratama Pontianak)*”. Politeknik Negeri Pontianak. Pontianak.

